



ABHIPRAYA
— SAMANVAYA —
SELARAS AKSI-TUNTAS KEMISKINAN



PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

INTEGRASI BASIS DATA KEMISKINAN

KOLABORASI UNTUK AKURASI DATA



PEMERINTAH
DAERAH DIY



PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA



MASYARAKAT

DASHBOARD KEMISKINAN TERINTEGRASI

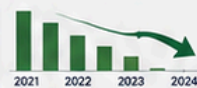


SEBARAN KEMISKINAN



JUMLAH PENDUDUK MISKIN

422.790

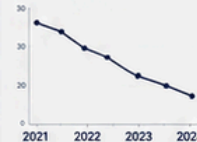


PERSENTASE KEMISKINAN

10,08%



TREND KEMISKINAN



DATA KEMISKINAN
TERINTEGRASI

- ✓ Akurat
- ✓ Mutakhir
- ✓ Terpadu
- ✓ Berkelanjutan

Oleh:

Danang Setiadi

06/PKN II/Angk.8/2026



SATU DATA
SATU NIAT



SATU ARAH
SATU TUJUAN



SATU GERAK
SATU HASIL



UNTUK JOGJA
YANG ISTIMEWA



RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

INTEGRASI BASIS DATA KEMISKINAN



Disusun oleh :
DANANG SETIADI, S.I.P.,M.T.
NDH: 06

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN VIII
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BEKERJASAMA DENGAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2026

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmatNya yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kami dapat menyusun Rancangan Proyek Perubahan (RPP) dengan judul **ABHIPRAYA SAMANVAYA: Integrasi Basis Data Kemiskinan** sesuai jadwal yang ditentukan. Rancangan Proyek Perubahan ini merupakan salah satu tahapan dalam proses pembelajaran yang harus dipenuhi dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN II) Angkatan VIII tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia bekerjasama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Isu yang diangkat dalam RPP ini adalah permasalahan kemiskinan yang masih menjadi salah satu isu strategis di DIY khususnya terkait dengan integrasi data kemiskinan. Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang relevan untuk diangkat mengingat sampai saat ini angka kemiskinan di DIY masih selalu di atas rata-rata nasional. Pada Tahun 2025, angka kemiskinan di DIY tercatat sebesar 10,08%. Meskipun setiap tahun persentase ini mengalami tren menurun, namun harus diakui bahwa penanganan kemiskinan masih belum optimal. Hal ini ditengarai karena masih terfragmentasinya data kemiskinan di masing-masing sektor dan wilayah. Selain itu, pemilihan isu ini juga didasarkan pada tugas fungsi organisasi adaptif, yaitu Bapperida DIY yang memiliki tugas diantaranya adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan. Selain itu, Bapperida juga merupakan instansi yang mengkoordinasikan aktivitas penanganan kemiskinan selaku Sekretariat Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Diharapkan dengan proyek perubahan yang akan dilaksanakan ini, dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder lainnya dalam menyusun program dan kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan.

Akhir kata, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian RPP ini, khususnya kepada Mentor, Ibu Ni Made Dwipanti Indrayanti, S.T., M.T. dan pembimbing (*coach*) Eko Yayuk Winartiningsih, SKM., M.Pd., atas bimbingan dan arahnya dalam menyelesaikan tugas ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh Tim Efektif Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) DIY yang telah membantu sesuai peran masing-masing dalam penyusunan Laporan RPP ini. Kami menyadari bahwa Laporan RPP ini masih jauh dari sempurna untuk bisa diimplementasikan. Untuk itu masukkan dan saran untuk perbaikan dan pengembangan RPP ini sangat diharapkan.

Yogyakarta, Juni 2026

Peserta Diklat PKN Tingkat II

Danang Setiadi, S.I.P., M.T.
NIP. 197704062005011007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
DAFTAR TABEL.....	5
HALAMAN PENGESAHAN.....	6
<i>EXECUTIVE SUMMARY</i>	7
DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN.....	8
I. PENDAHULUAN.....	9
1.1. Latar Belakang.....	9
1.2. Tujuan Proyek Perubahan.....	15
1.3. Manfaat.....	15
1.4. Ruang Lingkup.....	15
1.5. Output dan Outcome.....	16
II. ANALISA MASALAH.....	17
III. STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH.....	28
3.1. Terobosan inovatif.....	28
3.2. Pentahapan Rencana Proyek Perubahan.....	29
3.2.1. Program Jangka Pendek.....	29
3.2.2. Program Jangka Menengah.....	30
3.2.3. Program Jangka Panjang.....	31
3.3. Rencana Strategi Marketing.....	31
3.4. Pemetaan <i>Stakeholders</i> dan Sumberdaya Organisasi.....	34
3.5. Mobilisasi Stakeholder/Strategi Komunikasi.....	36
3.6. Manajemen Risiko.....	36
IV. MATERI PELATIHAN PILIHAN.....	38
4.1. Diagnosa Organisasi.....	38
4.2. Manajemen Pemerintahan.....	38
4.3. Pengawasan Berbasis Resiko.....	39
V. PEMETAAN SIKAP PERILAKU.....	40
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gambar Arsitektur Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	10
Gambar 2. Permasalahan Utama Pembangunan DIY dalam RPJMD 2022-2027	10
Gambar 3. Tingkat Kemiskinan DIY September 2018-September 2025	12
Gambar 4. Cascading Kinerja BAPPERIDA DIY	20
Gambar 5. Bagan Struktur Organisasi BAPPERIDA DIY	22
Gambar 6. Alur pikir komprehensif diagnosa organisasi	28
Gambar 7. Strategi marketing integrasi basis data kemiskinan	32
Gambar 8. Logo Branding Proyek Perubahan (Abhipraya Samanvaya)	33
Gambar 9. Pemetaan stakeholder berdasarkan Analisis dan Pengaruh Kepentingan	36
Gambar 10. Mobilisasi Stakeholder/Strategi Komunikasi	36
Gambar 11. Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Target Kinerja BAPPERIDA 2022-2027	21
Tabel 2. Keterangan skor APKL	24
Tabel 3. Hasil Analisis APKL	24
Tabel 4. Hasil analisis SWOT	25
Tabel 5. Hasil analisis USG	26
Tabel 6. Tahapan Utama (Milestone) Jangka Pendek	29
Tabel 7. Tahapan Utama (Milestone) Jangka Menengah	30
Tabel 8. Tahapan Utama (Milestone) Jangka Panjang	31
Tabel 9. Stakeholder berdasarkan Peran	34
Tabel 10. Identifikasi Potensi Masalah	37
Tabel 11. Rencana Pengembangan Potensi Diri dalam Proses Proyek Perubahan	41

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

Judul : INTEGRASI BASIS DATA KEMISKINAN (ABHIPRAYA SAMANVAYA)
Nama : Danang Setiadi, S.I.P.,M.T.
Angkatan : VIII
No. Absen : 06
Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 2026

Pembimbing,

Mentor,

Eko Yayuk Winartiningsih, SKM., M.Pd.
NIP.

Ni Made Dwipanti Indrayanti, S.T., M.T.
NIP. 197010181998032007

Penguji,

NIP.

EXECUTIVE SUMMARY

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya menurunkan tingkat kemiskinan melalui optimalisasi pemanfaatan belanja daerah yang berpihak pada masyarakat miskin dan rentan. Berdasarkan data hingga September 2025, tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 10,08 persen, atau setara dengan 422,79 ribu jiwa. Selama 5 tahun terakhir penurunan tingkat kemiskinan di DIY melambat diikuti dengan kenaikan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menjadi 1,792 memberikan gambaran bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan. Indeks P2 pada September 2025 mengalami kenaikan menjadi 0,466. Kenaikan indeks P2 memberikan gambaran bahwa kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin meningkat.

Saat ini berbagai jenis intervensi telah disampaikan kepada masyarakat baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun lembaga Non Pemerintah. Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) DIY mencatat terdapat 36 program, 47 kegiatan dan 173 sub kegiatan dengan anggaran sebesar 547,853 milyar rupiah yang dialokasikan oleh Pemda DIY dalam upaya pengentasan kemiskinan. Namun upaya tersebut ternyata belum cukup optimal menyelesaikan permasalahan kemiskinan di DIY. Kondisi ini ditengarai karena belum sinkronnya data kemiskinan sebagai basis intervensi program.

Proyek Perubahan ini disusun untuk menjawab permasalahan penyediaan data dan intervensi program kemiskinan yang terintegrasi antar sektor dan antar level pemerintahan. Hasil yang diharapkan dari implementasi proyek perubahan ini adalah tercapainya kesepakatan di antara Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mewujudkan integrasi basis data kemiskinan, pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana berbagi data kemiskinan dan selanjutnya basis data ini akan menjadi rujukan bagi seluruh stakeholder dalam program-program pengentasan kemiskinan. Pemanfaatan basis data kemiskinan yang terintegrasi ini diharapkan akan semakin menguatkan tren penurunan angka kemiskinan di DIY.

DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

1. Proyek perubahan yang diusulkan adalah membangun Integrasi Basis Data Kemiskinan di DIY.
2. Proyek perubahan mencakup kesepakatan integrasi data, rencana aksi untuk pemanfaatan teknologi informasi untuk integrasi data dan program intervensi program kemiskinan dengan sistem manajemen data yang *reliable* dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pemanfaatan integrasi basis data kemiskinan juga dalam rangka mengupayakan keamanan data dan skema berbagi pakai data antar *stakeholder*.
3. Hasil dari proses integrasi basis data kemiskinan juga memungkinkan meminimalisir adanya *Inclusion* dan *Exclusion Error* pada data BNBA sasaran program terutama penanggulangan kemiskinan juga duplikasi program atau tumpang tindih sasaran program/kegiatan.
4. Integrasi basis data akan menjadi alat untuk mensinergikan sasaran program bagi stakeholder dalam menyusun program dan kegiatan juga menentukan prioritas program .

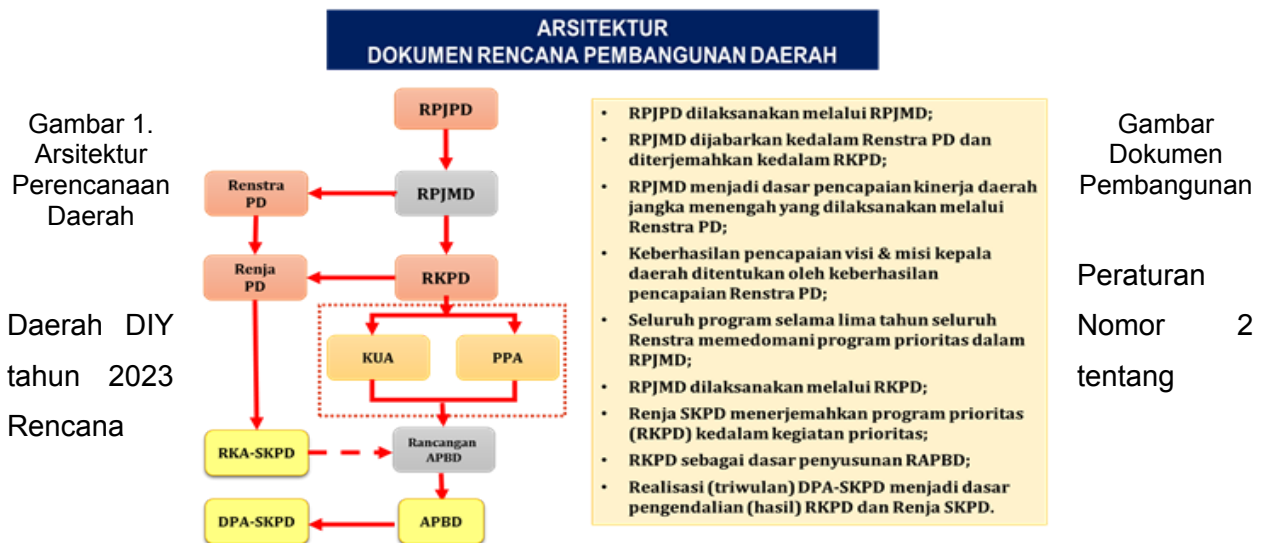
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui suatu siklus perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Pembangunan daerah tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi sebagai keseluruhan proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, BAPPERIDA memiliki peran strategis sebagai *leading sector* perencanaan pembangunan daerah yang memastikan keterpaduan seluruh tahapan pembangunan daerah. Pada tahap perencanaan, BAPPERIDA berperan mengoordinasikan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD agar selaras dengan visi misi kepala daerah, kebijakan nasional, serta aspirasi masyarakat.

Selain itu, melalui fungsi pengendalian dan evaluasi, BAPPERIDA berperan dalam menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah. Evaluasi kinerja pembangunan tidak hanya menjadi instrumen akuntabilitas, tetapi juga menjadi dasar perbaikan pada siklus perencanaan berikutnya. Kondisi inilah yang menuntut penguatan peran kepemimpinan administrator di BAPPERIDA agar mampu mengelola kompleksitas koordinasi lintas sektor dan memastikan sistem perencanaan pembangunan daerah berjalan efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Dokumen perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah, dapat dilihat pada gambar berikut:



Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJMD DIY) tahun 2022-2027 menunjukkan adanya empat permasalahan utama pembangunan yang perlu diselesaikan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembangunan daerah DIY yaitu: kemiskinan, ketimpangan antar wilayah, ketimpangan pendapatan, serta peningkatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta potensi bencana.



Gambar 2. Permasalahan Utama Pembangunan DIY dalam RPJMD 2022-2027

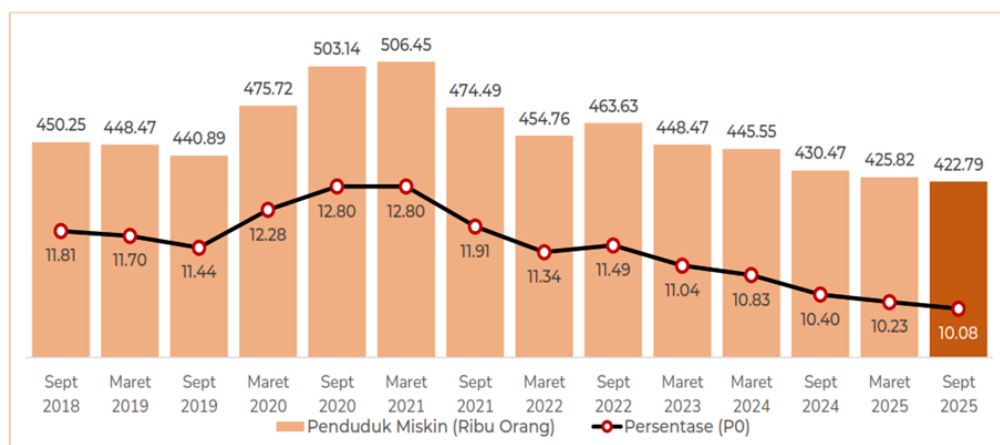
Kondisi dan permasalahan yang menyebutkan bahwa kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah pembangunan di DIY, sangat relevan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Visi Indonesia Tahun 2045

sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 adalah Indonesia sebagai NKRI yang Bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan yang sering disebut sebagai Visi Indonesia Emas 2045. Untuk mengukur ketercapaian visi tersebut salah satunya adalah kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang. Pada tahun 2045, kemiskinan nasional ditargetkan berkisar antara 0,5-0,8%. Selaras dengan RPJPN, tingkat kemiskinan juga menjadi indikator sasaran pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029 yang mana tingkat kemiskinan nasional ditargetkan 4,5-5,0% pada tahun 2029. Hal ini juga selaras dengan agenda SDG's dimana salah satu target sasaran dan tujuan pada 2030 adalah tanpa kemiskinan. Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif.

Kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan yang bersifat multidimensi dan masih menjadi salah satu isu strategis pembangunan daerah yang memerlukan penanganan secara terpadu, terukur, dan berbasis data. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut tercermin dalam visi pembangunan DIY Tahun 2045, yaitu “Terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan” sebagaimana yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY Tahun 2025-2045. Kemiskinan menjadi salah satu sasaran utama untuk menentukan keberhasilan visi pembangunan DIY dengan target pada tahun 2045 sebesar 0,41-0,91%. Melalui strategi pembangunan dengan visi Pancamulia pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2022–2027, kemiskinan menjadi salah satu indikator kinerjanya adalah penurunan angka kemiskinan. Pada akhir periode RPJMD DIY tersebut, ditargetkan tingkat kemiskinan mencapai 8,66%, sehingga diperlukan upaya yang cukup besar dan terintegrasi agar target tersebut dapat tercapai.

Dalam kurun waktu September 2018 hingga 2025, persentase dan jumlah penduduk miskin di DIY menunjukkan tren penurunan, meskipun mengalami kenaikan ketika pandemi *Covid-19*. Tingkat Kemiskinan (P0) DIY pada September 2025 sebesar 10,08%, angka tersebut turun sebesar 0,32% jika dibandingkan dengan September 2024, tetapi tingkat kemiskinan DIY masih di atas kemiskinan Indonesia, selain itu selama 10 tahun terakhir posisi DIY juga cenderung menjauhi tingkat kemiskinan Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

permasalahan kemiskinan di DIY masih memerlukan perhatian serius dan upaya penanganan yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2018-September 2025

Gambar 3. Tingkat Kemiskinan DIY September 2018-September 2025

Adanya disparitas tingkat kemiskinan antarwilayah di DIY yang menunjukkan ketimpangan karakteristik sosial ekonomi antar kabupaten/kota. Pada Maret 2025, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul masih mencatat angka kemiskinan tertinggi dibandingkan wilayah lain, masing-masing sebesar 14,53 persen dan 14,15 persen. Sebaliknya, Kota Yogyakarta memiliki tingkat kemiskinan terendah sebesar 6,14 persen. Hal tersebut selaras dengan tingkat kemiskinan menurut wilayah, tingkat kemiskinan di perdesaan secara konsisten lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Pada September 2025, persentase kemiskinan di wilayah perdesaan tercatat sebesar 10,37 persen, sedangkan wilayah perkotaan sebesar 9,99 persen. Perbedaan kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan di DIY bersifat multidimensional dan memiliki karakteristik wilayah yang berbeda, sehingga membutuhkan intervensi kebijakan yang spesifik sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Indeks keparahan kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Selama kurun waktu setahun, P1 DIY pada September 2025 mengalami kenaikan yang cukup tinggi menjadi 1,792. Kenaikan P1 memberikan gambaran bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan. P2 juga menunjukkan adanya kecenderungan meningkat pada rentang waktu yang sama. Indeks P2 pada September 2025 mengalami kenaikan menjadi 0,466. Kenaikan indeks P2 memberikan gambaran bahwa kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin meningkat.

Pemerintah Daerah DIY telah melakukan berbagai upaya melalui program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan meliputi kelompok program perlindungan dan jaminan sosial,

rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan akses pelayanan dasar. Selama rentang tahun 2021-2025 dukungan anggaran dan realisasi program penanggulangan kemiskinan bergerak fluktuatif. Dukungan tahun 2025 sebesar 327,39 Milyar dengan realisasi sebesar 316,76 Milyar atau 96,76%. Sedangkan, dukungan jumlah sub kegiatan dan OPD memiliki pola yang sama yaitu cenderung meningkat. Peningkatan jumlah sub kegiatan dan keterlibatan OPD ini menunjukkan semakin luasnya komitmen Pemerintah Daerah DIY dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Topik yang diangkat dalam Proyek Perubahan adalah mengenai integrasi basis data kemiskinan mengingat masih adanya *Inclusion* dan *Exclusion Error* pada data BNBA sasaran program terutama penanggulangan kemiskinan. Selain itu, topik ini diangkat menjadi isu dalam proyek perubahan dikarenakan fenomena data intervensi program di DIY utamanya dalam rangka penanggulangan kemiskinan masih terfragmentasi tersimpan dalam database yang terpisah-pisah. Dalam hal ini tentu yang terjadi adalah kurangnya keamanan data internal dan berbagi pakai data terutama data pribadi dalam proses penyusunan kebijakan dan perencanaan program. Berbagai permasalahan data sasaran seperti duplikasi program atau tumpang tindih sasaran program/kegiatan, sulitnya menentukan prioritas program, kesulitan Akses dan Analisis dengan data yang tersebar, menghambat analisis mendalam yang diperlukan untuk evaluasi intervensi atau kebijakan dan karena data tidak terintegrasi atau real-time, pengambil kebijakan tidak memiliki informasi yang akurat dan cepat untuk merespons situasi. Untuk itu, perlu adanya suatu kebijakan integrasi data yang sifatnya komprehensif dan koordinatif dengan melibatkan berbagai stakeholder untuk mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan agar lebih tepat sasaran dengan updating data pensasaran dan penerima intervensi secara berkala, dan penggunaan data yang telah terintegrasi sebagai bahan perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penanganan kemiskinan. Dengan fokus intervensi penanganan kemiskinan mengacu pada basis data yang sama diharapkan bisa signifikan mendukung penurunan tingkat kemiskinan.

Proyek perubahan integrasi basis data kemiskinan sangat relevan dilaksanakan oleh Bapperida DIY mengingat tugas Bapperida DIY sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah adalah menyelenggarakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan, serta urusan pemerintahan bidang statistik. Oleh karena itu Bapperida DIY merupakan lembaga strategis dalam merumuskan format perencanaan

pembangunan, memastikan program-program strategis harus bisa terlaksana di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota, dan mengkoordinasikan program yang mendukung isu strategis di DIY.

Sementara itu, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42/TIM/2026 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026, Bapperida DIY berkedudukan sebagai Sekretaris TKPKD DIY dimana fungsi dari TKPKD DIY tingkat provinsi diantaranya adalah koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan dan penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia, Bapperida DIY sebagai Walidata Tingkat Provinsi karena merupakan perangkat daerah yang membidangi urusan statistik di provinsi yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data. Mengacu pada hal tersebut, maka sangat relevan apabila Bapperida DIY melaksanakan fungsi koordinasi dan kesekretariatan dengan suatu proyek integrasi basis data kemiskinan.

Reformasi Birokrasi (RB) berdampak pada proyek perubahan integrasi basis data kemiskinan tidak hanya fokus pada perbaikan tata kelola pemanfaatan data sasaran penanggulangan kemiskinan tetapi juga menjadi kunci untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran dan berbasis bukti hasil integrasi. Melalui penyatuan data lintas sektor, kebijakan ini memastikan penyaluran bantuan sosial (seperti bansos dan program pemberdayaan) menjadi jauh lebih tepat sasaran, akurat, dan efektif dalam menurunkan angka kemiskinan.

Integrasi basis data kemiskinan menjadi upaya yang signifikan dalam penanggulangan kemiskinan di DIY terutama agar menjadi lebih tepat sasaran mengingat saat ini sudah banyak sekali program-program penanggulangan kemiskinan baik berupa bansos maupun pemberdayaan namun masih belum memiliki daya ungkit yang besar terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Upaya-upaya sudah dilakukan saat ini sifatnya masih parsial dan belum terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik. Adanya Integrasi Basis Data Kemiskinan ini akan menjadi kebijakan yang strategis dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan di DIY.

1.2. Tujuan Proyek Perubahan

Tujuan proyek perubahan ini adalah untuk mewujudkan basis data kemiskinan dan intervensi program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi di DIY.

1. Tujuan Jangka Pendek
Tujuan jangka pendek dari proyek perubahan ini adalah tersusunnya kesepakatan bersama integrasi data kemiskinan di DIY.
2. Tujuan Jangka Menengah
Tujuan jangka menengah dari proyek perubahan ini adalah tersusunnya basis data kemiskinan dalam sistem pendataan yang terintegrasi.
3. Tujuan Jangka Panjang
Tujuan jangka panjang dari proyek perubahan ini adalah termanfaatkannya basis data kemiskinan sebagai rujukan intervensi program penanggulangan kemiskinan oleh stakeholder.

1.3. Manfaat

1. Bagi Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah akan memiliki basis data kemiskinan terpadu sehingga program-program penurunan kemiskinan menjadi lebih efektif dan lebih tepat sasaran.
2. Bagi Akademisi
Dapat digunakan sebagai referensi bagi akademisi untuk topik-topik penelitian dan program-program pengabdian masyarakat.
3. Bagi Dunia Usaha
Basis data kemiskinan ini dapat digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan program-program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP).
4. Bagi Media
Diharapkan media memperoleh informasi yang lebih jelas terkait pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan, sehingga media dapat menjadi mitra pemerintah dalam mengedukasi dan meningkatkan literasi masyarakat.
5. Bagi Masyarakat
Masyarakat semakin mendapatkan kepastian layanan sasaran intervensi program kemiskinan. Selanjutnya dengan data dan informasi yang berkualitas, kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan akan semakin meningkat.

1.4. Ruang Lingkup

1. Kesepakatan integrasi data dengan pihak terkait.
2. Integrasi data pensasaran penerima manfaat program/kegiatan dan integrasi data intervensi penanggulangan kemiskinan melalui sistem.
3. Pemanfaatan data yang telah terintegrasi sebagai bahan perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penanganan kemiskinan.

1.5. Output dan Outcome

Output dari proyek perubahan ini adalah kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang integrasi data kemiskinan.

Outcome dari proyek perubahan ini adalah basis data kemiskinan DIY yang dimanfaatkan oleh *stakeholder* dalam intervensi program-program penanggulangan kemiskinan.

II. ANALISA MASALAH

2.1. Profil Kinerja Pelayanan

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperoleh apresiasi dari Pemerintah Pusat atas keberhasilannya dalam mengimplementasikan konsep *Performance Based Organization* (PBO) dalam penataan kelembagaan perangkat daerah. Pendekatan ini menempatkan kinerja sebagai orientasi utama organisasi, yang diturunkan langsung dari arah kebijakan dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY dibentuk sebagai *vision driven organization*, yaitu organisasi yang secara struktural dan fungsional dirancang untuk mewujudkan visi pembangunan daerah.

Implementasi konsep tersebut tercermin dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. Orientasi kinerja tercermin dalam struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) DIY, antara lain melalui keberadaan Bidang Perencanaan dan Pengendalian yang secara eksplisit mengemban tugas penyusunan, sinkronisasi, pengendalian, serta pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, serta pencantuman nomenklatur Riset dan Inovasi sebagai tugas fungsi utama yang dilaksanakan oleh BAPPERIDA DIY.

BAPPERIDA DIY dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah, sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2024. BAPPERIDA DIY memiliki tugas menyelenggarakan fungsi sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan, serta urusan pemerintahan bidang statistik. Adapun fungsi BAPPERIDA DIY meliputi:

1. penyusunan rencana kerja Badan;
2. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan, riset dan inovasi daerah, serta bidang statistik;
3. pelaksanaan koordinasi bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan, riset dan inovasi daerah serta bidang statistik;
4. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan, riset dan inovasi daerah serta bidang statistik;

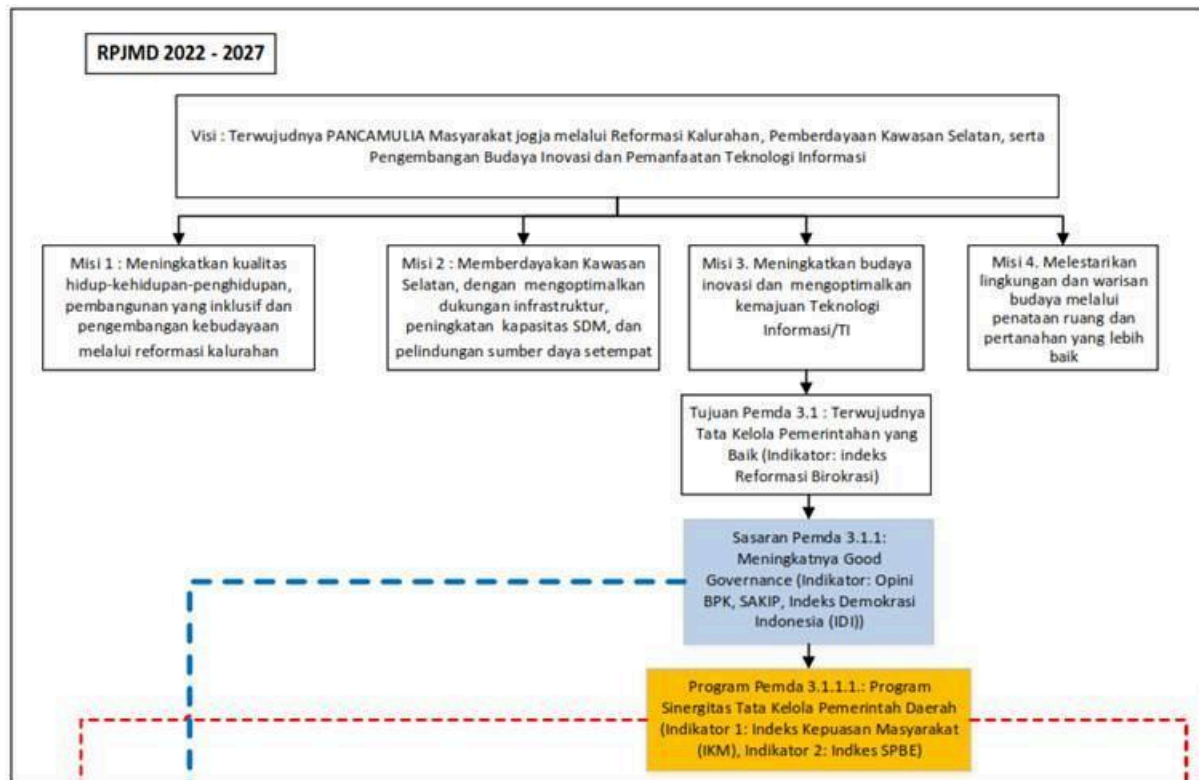
5. penyelenggaraan pengendalian pembangunan daerah;
6. penyelenggaraan statistik daerah;
7. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan, riset dan inovasi daerah, serta bidang statistik;
8. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan, riset dan inovasi daerah, serta bidang statistik Kabupaten/Kota;
9. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
10. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
11. pembinaan reformasi birokrasi Badan;
12. penyusunan kebijakan proses bisnis Badan;
13. penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Badan;
14. pembinaan jabatan fungsional;
15. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
16. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

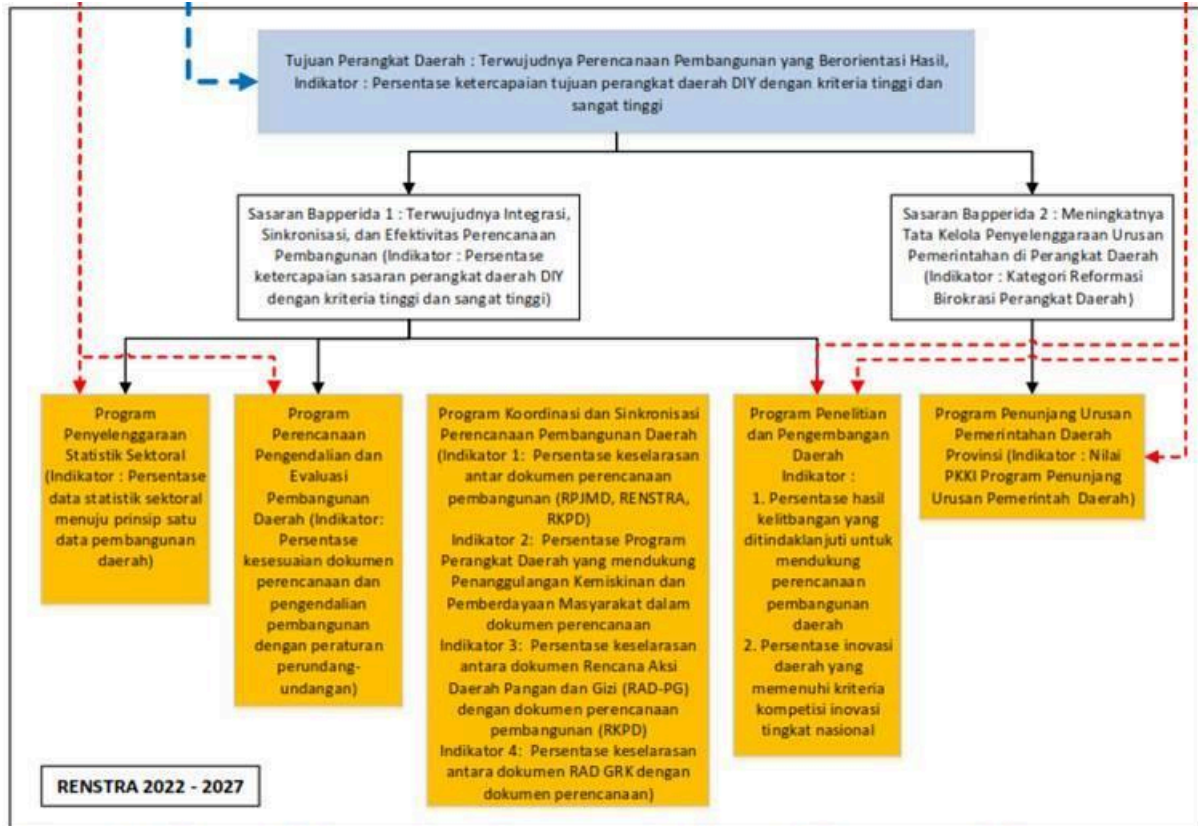
Dengan cakupan tugas dan fungsi tersebut, BAPPERIDA DIY memegang peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur DIY, khususnya dalam penyediaan data pembangunan yang andal, penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas, serta pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2022–2027, visi pembangunan DIY adalah “Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.” Visi tersebut dijabarkan ke dalam empat misi pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;
2. Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat;
3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi;

4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanian yang lebih baik.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran BAPPERIDA DIY diwujudkan melalui *cascading* kinerja yang menggambarkan alur penjabaran kinerja secara sistematis dari level strategis hingga operasional digambarkan sebagai berikut.





Sumber : RPJMD 2022-2027, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2022-2027

Gambar 4. Cascading Kinerja BAPPERIDA DIY

Selanjutnya, target kinerja tujuan dan sasaran BAPPERIDA DIY pada periode tahun 2022–2027 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BAPPERIDA DIY yang menjadi dasar pengukuran kinerja organisasi dalam mendukung pencapaian RPJMD DIY dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 1. Tabel Target Kinerja BAPPERIDA 2022-2027

(1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				Baseline (2022) (4)	1 (2023) (5)	2 (2024) (6)	3 (2025) (7)	4 (2026) (8)	5 (2027) (9)
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil		Persentase ketercapaian tujuan perangkat daerah DIY dengan kriteria tinggi dan sangat tinggi	N/A	83,93%	85,71%	87,50%	89,29%	91,07%
1.1		Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi dan Efektifitas Perencanaan Pembangunan	Persentase ketercapaian sasaran perangkat daerah DIY dengan kriteria tinggi dan sangat tinggi	86,90%	87,30%	88,10%	88,89%	89,68%	90,48%
1.2		Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A (84,80)	A (95,43)	A (95,44)	A (95,45)	A (95,46)	A (95,47)

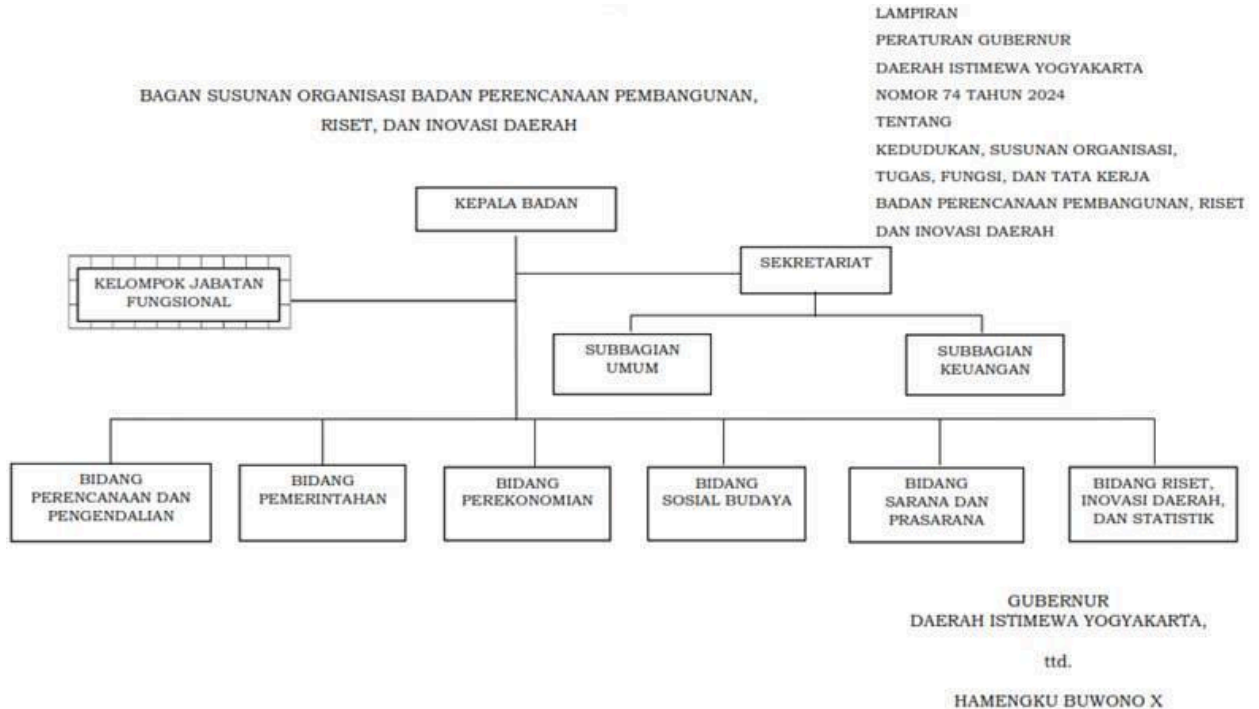
Sumber: Renstra BAPPERIDA DIY, 2022-2027

Peran utama BAPPERIDA DIY dalam perencanaan pembangunan daerah tercermin melalui proses penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan strategis dan operasional. Produk utama yang dihasilkan antara lain:

1. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Murni dan RKPD Perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni dan APBD Perubahan;
2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah;
3. Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian pembangunan daerah (antara lain laporan monev dan laporan evaluasi dokumen perencanaan);
4. Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) jangka 5 tahunan, Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan jangka 1 tahunan, Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) sebagai hasil monev, dan Laporan Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (OPPKPKE).

5. Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), RAD Pangan dan Gizi, RAD Pembangunan Rendah Karbon (PRK).
6. Dokumen Analisis Data dan Statistik guna menunjang perencanaan pembangunan yang berkualitas, yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik DIY; dan
7. Dokumen hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

Untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan, struktur organisasi BAPPERIDA DIY sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5. Bagan Struktur Organisasi BAPPERIDA DIY

2.2. Analisa Organisasi

BAPPERIDA DIY sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas fungsi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah tentunya telah berupaya secara maksimal untuk melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan. BAPPERIDA DIY juga telah berupaya melakukan monitoring dan evaluasi

agar pelaksanaan program kegiatan dapat menghasilkan dampak yang tercermin dari pencapaian indikator utama pembangunan.

Namun demikian, perlu dilakukan diagnosis organisasi untuk menemukan gejala atau masalah yang muncul dan dapat mengganggu capaian kinerja organisasi dalam memberikan kualitas pelayanan publik yang optimal. Diagnosis organisasi dimaksudkan untuk menilai kondisi organisasi yang semula dianggap masih berupa isu menjadi masalah nyata yang harus diselesaikan. Diagnosis organisasi dilakukan dengan memotret kondisi saat ini (*eksisting*) dan membandingkan dengan kondisi ideal yang diharapkan. Setelah dilakukan identifikasi tersebut, akan didapatkan kesenjangan atau gap yang harus diatasi.

Bapperida DIY sebagai perangkat daerah yang mengawal keberhasilan indikator-indikator keberhasilan pembangunan daerah, perlu melakukan analisa terhadap capaian-capaian kinerja pembangunan daerah. Berangkat dari identifikasi capaian pembangunan DIY yang masih belum mencapai hasil optimal, diperoleh empat isu utama dalam capaian pembangunan DIY yang meliputi:

- 1) Kemiskinan;
- 2) Ketimpangan pendapatan;
- 3) Ketimpangan antar;
- 4) Pencemaran lingkungan dan resiko bencana.

Selanjutnya untuk menetapkan prioritas permasalahan, digunakan analisis APKL yang meliputi skoring terhadap komponen Aktual (A), Problematik (P), Kekhalayakan (K), dan Kelayakan (L).

A : *Aktual* adalah tingkat kondisi isu permasalahan sedang terjadi, hangat dibicarakan, atau baru saja terjadi

P : *Problematik* artinya isu memiliki dimensi masalah yang kompleks, menyimpang dari harapan dan perlu segera dicarikan solusi

K : *Kekhalayakan* artinya isu menyangkut hajat hidup orang banyak atau kepentingan masyarakat/unit kerja

L : *Layak* artinya isu yang masuk akal (*logis*) pantas, realistis, sesuai dengan tugas, hak, kewenangan dan tanggung jawab

Langkah-langkah Analisis APKL:

1. Identifikasi Isu: menemukan beberapa masalah/isu di lingkungan kerja.

2. Skoring (1-5): memberikan nilai pada masing-masing kriteria (A, P, K, L).
3. Total Skor: menjumlahkan skor dari keempat kriteria.
4. Penetapan Prioritas: Isu dengan total skor tertinggi dipilih sebagai core issue

Adapun skor tabel APKL dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Keterangan skor APKL

No	Skor	Scoring			
		Aktual	Problematic	Kekhalayakan	Layak
1.	1	Kadaluarsa	Terkondisikan	Personal	Buruk
2.	2	Hampir Kadaluarsa	Kurang Problematic	Sedikit Pendapat	Kurang Layak
3.	3	Cukup Aktual	Cukup Problematic	Cukup Kekhalayakan	Cukup Layak
4.	4	Aktual	Problematic	Kekhalayakan	Layak
5.	5	Sangat Aktual	Sangat Problematic	Sangat Kekhalayakan	Sangat Layak

Hasil analisa APKL adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Analisis APKL

No.	MASALAH	ANALISIS				Total Nilai	Rang king
		A	P	K	L		
1	Kemiskinan	5	5	4	4	18	I
2	Ketimpangan pendapatan	4	3	3	3	13	IV
3	Ketimpangan wilayah	4	4	3	4	15	III
4	Pencemaran lingkungan dan resiko bencana	5	3	4	4	16	II

Berdasarkan analisis APKL di atas, fokus masalah yang diangkat dan akan diselesaikan melalui gagasan proyek perubahan ini adalah “**kemiskinan**”.

2.3. Analisis Lingkungan Strategis

Tahapan berikutnya untuk menentukan strategi dalam mengatasi permasalahan dianalisis menggunakan SWOT, untuk mengevaluasi suatu situasi atau masalah dengan mempertimbangkan *Strengths* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), dan *Threats* (Ancaman), dengan komponen analisis meliputi:

- **Strengths (Kekuatan)** → Faktor internal yang menjadi keunggulan dalam menyelesaikan masalah.

- **Weaknesses (Kelemahan)** → Faktor internal yang dapat menghambat penyelesaian masalah.
- **Opportunities (Peluang)** → Faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi masalah.
- **Threats (Ancaman)** → Faktor eksternal yang berpotensi menghambat penyelesaian masalah.

Perumusan alternatif strategi melalui SWOT dilakukan sebagai berikut:

1. **Strategi SO (Strengths – Opportunities)** → Memanfaatkan kekuatan untuk mengambil peluang.
2. **Strategi WO (Weaknesses – Opportunities)** → Mengurangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada.
3. **Strategi ST (Strengths – Threats)** → Menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman.
4. **Strategi WT (Weaknesses – Threats)** → Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

Tabel 4. Hasil analisis SWOT

	STRENGTH (Kekuatan Internal DIY)	WEAKNESS (Kelemahan Internal)
	1. Modal Sosial dan Budaya Kuat 2. Kepemimpinan dan Stabilitas Pemerintahan 3. Infrastruktur Sosial dan Layanan Dasar memadai 4. Data Kemiskinan Relatif Tersedia 5. Infrastruktur Teknologi Informasi memadai	1. Struktur Kemiskinan Bersifat Kronis 2. Banyak rumah tangga terjebak kemiskinan jangka panjang 3. Fragmentasi Data dan Program Intervensi 4. Mental ketergantungan Bantuan Sosial 5. Struktur Ekonomi DIY didominasi sektor informal
OPPORTUNITIES	SO STRATEGY (Strength-Opportunities)	WO STRATEGY (Weakness-Opportunities)
1. Transformasi Ekonomi Baru 2. Dukungan Kebijakan Nasional 3. Adanya Kolaborasi Multi Pihak 4. Digitalisasi Pemerintahan	• Membangun kolaborasi <i>stakeholder</i> pembangunan/pentahelix • Penguatan pemberdayaan ekonomi lokal • Penanganan kemiskinan berbasis teknologi informasi	• Skema graduasi bantuan kewirausahaan & pekerjaan produktif yang berkelanjutan. • Pemanfaatan teknologi informasi untuk integrasi data dan program intervensi yang terfragmentasi • Membentuk aglomerasi untuk menciptakan ekosistem yang saling melengkapi
THREATS	ST STRATEGY (Strength-Threats)	WT STRATEGY (Weakness-Threats)

1. Urbanisasi & Migrasi Penduduk 2. Pekerjaan Rentan terhadap Krisis 3. <i>Aging Society</i> DIY 4. Kenaikan Biaya Hidup	• Penguatan ekonomi berbasis komunitas lokal untuk menghadapi krisis ekonomi. • Pemberdayaan psikososial lansia produktif • Sistem Manajemen data yang reliable	• Reformulasi bansos menjadi bantuan transisi. • Intervensi kelompok rentan • Program peningkatan produktivitas dan memperluas akses kesempatan kerja bagi informal
---	---	---

Dari strategi yang dihasilkan dari analisis SWOT didapatkan strategi yaitu sebagai berikut :

1. Membangun kolaborasi *stakeholder* pembangunan/pentahelix
2. Penguatan pemberdayaan ekonomi lokal
3. Penanganan kemiskinan berbasis teknologi informasi
4. Skema graduasi bantuan kewirausahaan & pekerjaan produktif yang berkelanjutan.
5. Pemanfaatan teknologi informasi untuk integrasi data dan program intervensi yang terfragmentasi
6. Membentuk aglomerasi untuk menciptakan ekosistem yang saling melengkapi
7. Penguatan ekonomi berbasis komunitas lokal untuk menghadapi krisis ekonomi.
8. Pemberdayaan psikososial lansia produktif
9. Sistem Manajemen data yang reliable
10. Reformulasi bansos menjadi bantuan transisi.
11. Intervensi kelompok rentan
12. Program peningkatan produktivitas dan memperluas akses kesempatan kerja bagi informal

Analisis USG (*Urgency, Seriousness dan Growth*)

Metode USG merupakan salah satu metode untuk menentukan urutan prioritas isu yang perlu diselesaikan dengan menilai tingkat *urgency*, *seriousness*, dan *growth* menggunakan skala penilaian 1–5. Isu dengan total skor tertinggi ditetapkan sebagai isu prioritas untuk ditangani. ***Urgency*** menggambarkan tingkat keterdesakan suatu isu untuk segera dibahas berdasarkan ketersediaan waktu dan tekanan waktu dalam penyelesaian masalah. ***Seriousness*** menunjukkan tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan apabila masalah tidak segera diselesaikan, termasuk kemungkinan munculnya masalah lain. Sementara itu, ***growth*** menunjukkan potensi perkembangan isu menjadi semakin buruk apabila tidak segera ditangani. Berdasarkan hasil analisis SWOT sebelumnya, diperoleh 12 strategi yang selanjutnya perlu dianalisis untuk menentukan strategi yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaannya.

Tabel 5. Hasil analisis USG

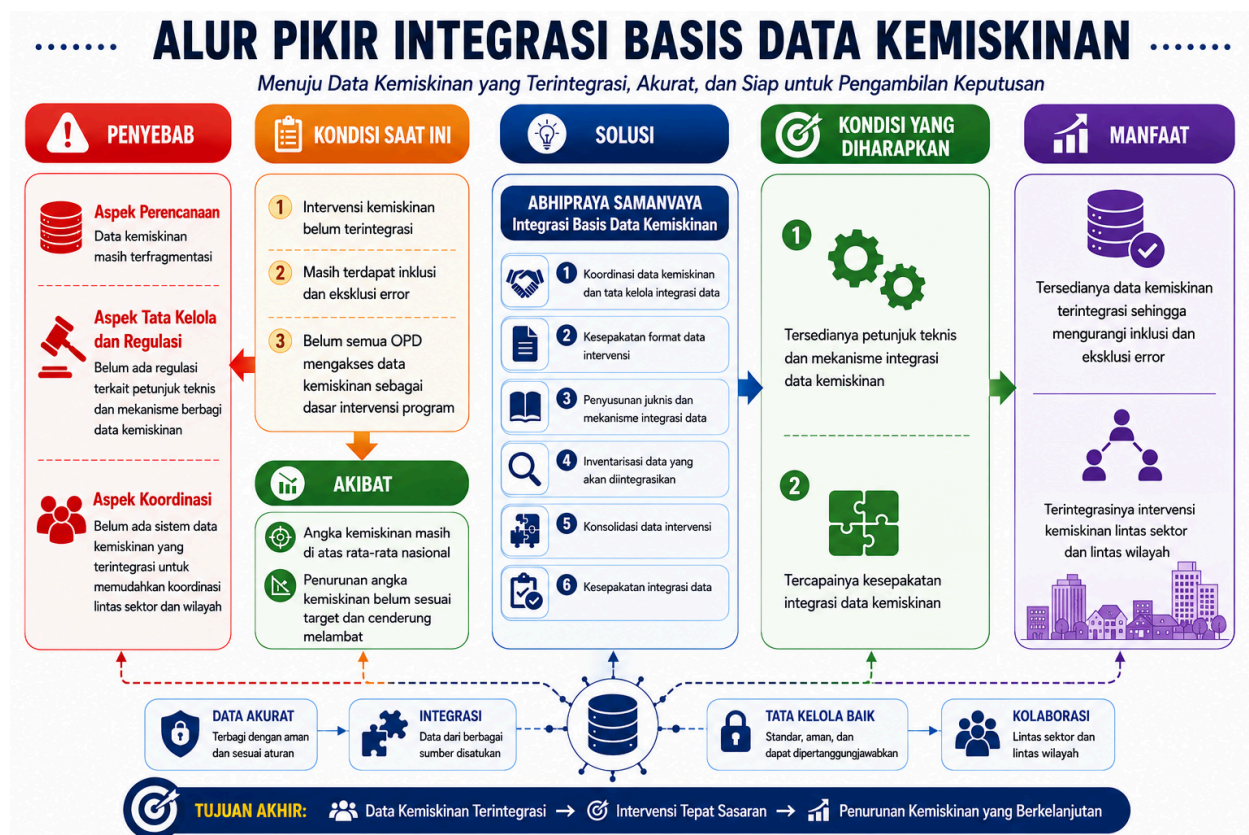
No.	Strategi	U (Urgency)	S (Seriousness)	G (Growth)	Total	Urut
1	Membangun kolaborasi <i>stakeholder</i> pembangunan/ <i>pentahelix</i>	3.8	3.6	3.6	11.0	8
2	Penguatan pemberdayaan ekonomi lokal	4.2	4.0	4.0	12.2	4
3	Penanganan kemiskinan berbasis teknologi informasi	4.8	4.4	4.4	13.6	3
4	Skema graduasi bantuan kewirausahaan & pekerjaan produktif yang berkelanjutan.	3.6	3.8	3.6	11.0	8
5	Pemanfaatan teknologi informasi untuk integrasi data dan program intervensi yang terfragmentasi	5.0	5.0	4.6	14.6	1
6	Membentuk aglomerasi untuk menciptakan ekosistem yang saling melengkapi	3.2	3.6	4.0	10.8	11
7	Penguatan ekonomi berbasis komunitas lokal untuk menghadapi krisis ekonomi.	3.8	3.4	3.8	11.0	8
8	Pemberdayaan psikososial lansia produktif	3.6	4.2	3.6	11.4	6
9	Sistem Manajemen data yang <i>reliable</i>	4.8	4.6	5.0	14.4	2
10	Reformulasi bansos menjadi bantuan transisi.	3.6	3.6	3.4	10.6	12
11	Intervensi kelompok rentan	3.8	4.0	4.0	11.8	5
12	Program peningkatan produktivitas dan memperluas akses kesempatan kerja bagi informal	3.4	4.0	4.0	11.4	6

Berdasarkan analisis USG diperoleh bahwa strategi “Pemanfaatan teknologi informasi untuk integrasi data dan program intervensi yang terfragmentasi” memperoleh skor tertinggi dengan total skor 14,6 sehingga menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan. Selanjutnya, strategi “Sistem Manajemen data yang *reliable*” dan “Penanganan kemiskinan berbasis teknologi informasi” menempati urutan prioritas berikutnya. Ketiga strategi teratas memiliki keterkaitan satu sama lain untuk memanfaatkan teknologi informasi melalui sistem manajemen untuk mendukung integrasi data, sehingga diperlukan integrasi data terutama pada pensasaran dan penerima intervensi sebagai acuan perencanaan, intervensi dan evaluasi penanganan kemiskinan daerah di DIY dan Kabupaten/Kota.

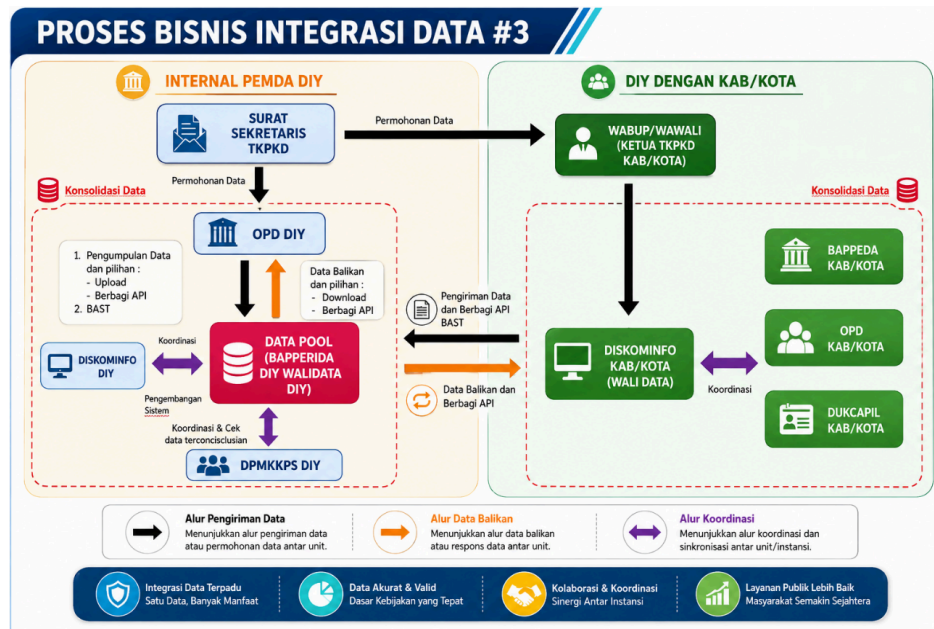
III. STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

3.1. Terobosan inovatif

Proyek perubahan yang akan dilakukan adalah: **Abhipraya Samanvaya: Integrasi Basis Data Kemiskinan** yang dimaknai sebagai suatu proses sistematis dan terintegrasi untuk mewujudkan ketersediaan data dan intervensi kemiskinan. Ruang lingkup aksi proyek perubahan yang akan dilaksanakan adalah inovasi untuk menyediakan data kemiskinan yang terintegrasi. Lingkup aktivitas dibagi menjadi 3 (tiga tahapan) yakni Jangka Pendek (60 hari kerja), Jangka Menengah (3 bulan – 1 tahun), dan Jangka Panjang (>1 tahun – 2 tahun), dengan output menyesuaikan masing-masing jangka waktu tersebut. Aktivitas dan intervensi dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi peserta pelatihan, namun juga diarahkan untuk mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung realisasi rancangan aksi perubahan yang akan dilakukan. Alur pikir komprehensif diagnosa organisasi dapat disajikan sebagai berikut.



Gambar 6. Alur pikir komprehensif diagnosa organisasi



3.2. Pentahapan Rencana Proyek Perubahan

Pentahapan rencana proyek perubahan adalah urutan pencapaian atau *milestone* penting beserta target waktu (minggu, bulan) yang dirancang untuk memastikan suatu inovasi atau perubahan di instansi dapat diimplementasikan secara sistematis, terukur, dan tepat sasaran. Agar terarah dan terstruktur dengan baik, berikut adalah pentahapan umum yang biasanya digunakan dalam proyek perubahan:

3.2.1. Program Jangka Pendek

Program jangka pendek akan dicapai dalam kurun waktu 2 (dua) bulan atau sesuai masa aktualisasi dengan tahapan Pemahaman rencana proyek perubahan dan pembentukan tim efektif, Koordinasi data dan intervensi kemiskinan, Penyusunan juknis dan mekanisme integrasi data, Inventarisasi data yang akan diintegrasikan, Konsolidasi data intervensi serta Kesepakatan integrasi data. Hasil capaian pada tahap ini adalah MoU atau penyepakatan basis data bersama (Pemda DIY, Kabupaten/Kota, dan instansi vertikal).

Tabel 6. Tahapan Utama (*Milestone*) Jangka Pendek

NO.	TAHAPAN UTAMA (<i>MILESTONE</i>)	OUTPUT KUNCI	WAKTU
I	JANGKA PENDEK (60 HARI KERJA)		
1.	Persiapan	SK Kepala Bapperida tentang Tim Efektif	Minggu II Juni 2026

NO.	TAHAPAN UTAMA (MILESTONE)	OUTPUT KUNCI	WAKTU
2.	Koordinasi data kemiskinan dan tata kelola integrasi data	Analisis Masalah dan Kerangka Berpikir	Minggu III Juni 2026
3.	Kesepakatan Format data intervensi	• Inventarisasi jenis-jenis intervensi di DIY dan Kabupaten/Kota • Referensi data dan kode informasi	Minggu III Juni 2026
4.	Penyusunan Petunjuk Teknis dan mekanisme integrasi data	SK Kepala Bapperida Petunjuk Teknis Integrasi Data	Minggu II-IV Juni 2026
5.	Inventarisasi Data yang akan diintegrasikan	Surat inventarisasi data intervensi kepada OPD DIY dan Kabupaten Kota Daftar data intervensi	Minggu IV Juni 2026
6.	Pengembangan API	Terbangunnya API (<i>Application Programming Interface</i>)	Minggu II-IV Juni 2026
7.	Ujicoba API	Laporan uji coba	Minggu I-II Juli 2026
8.	Konsolidasi data intervensi	Data rekap hasil konsolidasi data intervensi	Minggu III Juli 2026
9.	Kesepakatan integrasi data	Dokumen Kesepakatan Integrasi Data	Minggu IV Juli 2026
10.	Evaluasi	Dokumen evaluasi	Minggu I Agustus 2026

3.2.2. Program Jangka Menengah

Program jangka menengah dilakukan sebagai tindak lanjut program jangka pendek dan pengembangannya yang akan dicapai dalam beberapa tahapan yaitu pengembangan API, pengumpulan data awal kabupaten/kota, *mapping* data awal, ujicoba API dan integrasi data online dalam kurun waktu 6 bulan sampai dengan 1 tahun dengan hasil capaian Integrasi data pensasaran dan penerima intervensi kemiskinan secara sistem.

Tabel 7. Tahapan Utama (Milestone) Jangka Menengah

NO.	TAHAPAN UTAMA (MILESTONE)	OUTPUT KUNCI	WAKTU
II	JANGKA MENENGAH (3 BULAN – 1 TAHUN)		
1.	Pengumpulan data awal	- Rapat Koordinasi Penyiapan Sistem Integrasi Data - BAST data intervensi Kabupaten/Kota - BAST data intervensi DIY	Minggu II-III Agustus 2026
2.	Mapping data awal	<i>Schema Matching</i> data intervensi - Data intervensi terkumpul di sistem DIY	Minggu IV Agustus –Minggu I Sept 2026
3.	Integrasi data dalam sistem	Data BNBA all penduduk DIY dengan atribut intervensi	Minggu II September-Minggu I Oktober 2026

3.2.3. Program Jangka Panjang

Program jangka panjang akan ditempuh 12-24 bulan, sebagai kelanjutan dari program jangka pendek dan menengah yang akan dicapai dengan updating data pensasaran dan penerima intervensi serta penggunaan data yang telah terintegrasi sebagai bahan perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penanganan kemiskinan. Capaian hasil dari tahap akhir ini adalah Intervensi penanganan kemiskinan mengacu pada basis data yang sama.

Tabel 8. Tahapan Utama (Milestone) Jangka Panjang

NO.	TAHAPAN UTAMA (MILESTONE)	OUTPUT KUNCI	WAKTU
III	JANGKA PANJANG (>1 TAHUN – 2 TAHUN)		
1.	Updating data sasaran dan penerima manfaat	Data intervensi update sesuai dengan jangka waktu masing-masing intervensi	Januari 2027 dst
2.	Penggunaan data yang telah terintegrasi sebagai bahan perencanaan, pemantauan dan	SE Wakil Gubernur terkait data pensasaran penanggulangan kemiskinan	Februari 2027 dst

NO.	TAHAPAN UTAMA (MILESTONE)	OUTPUT KUNCI	WAKTU
	evaluasi pelaksanaan program		

3.3. Rencana Strategi Marketing

Strategi marketing merupakan langkah penting untuk membangun dukungan, komitmen, dan keterlibatan para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan integrasi basis data kemiskinan. Strategi marketing tidak hanya dimaknai sebagai upaya penyebarluasan informasi, tetapi juga sebagai proses komunikasi strategis untuk menciptakan pemahaman bersama mengenai pentingnya integrasi data dalam mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran, terpadu, dan berbasis data. Strategi marketing integrasi basis data kemiskinan menggunakan formula 4P1C yaitu *product*, *price*, *place*, *promotion*, dan *customer*.



Gambar 7. Strategi marketing integrasi basis data kemiskinan

1. **Product**

Produk yang dihasilkan dari proper ini adalah:

- Kesepakatan Wakil Kepala Daerah se-DIY selaku Ketua TKPKD untuk integrasi basis data dan intervensi program
- Sistem Informasi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi di DIY

2. **Price**

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota lebih mudah mengontrol dan mengevaluasi intervensi program-program kemiskinan.

3. *Place*

Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi vertikal.

4. *Promotion*

Program ini akan di *branding* dengan nama “Abhipraya Samanvaya”. **Abhiprāya Samanvaya** adalah frasa dalam **Bahasa Jawa Kuna / Sanskerta** yang sangat kuat secara filosofis. Frasa Abhipraya Samanvaya dapat dimaknai sebagai berikut:

Abhipraya: niat luhur, tujuan bersama, kehendak kolektif, arah kebijakan yang disepakati.

Dalam konteks kepemimpinan publik dapat dimaknai sebagai visi bersama yang disadari dan diinginkan seluruh pihak.

Samanvaya: penyelarasan, sinkronisasi, integrasi lintas pihak, koordinasi harmonis.

Dalam konteks tatakelola dapat dimaknai sebagai kerja bersama lintas sektor dan lintas pemerintahan.

Secara keseluruhan, Abhipraya Samanvaya bermakna penyelarasan kehendak bersama menuju tujuan pembangunan yang satu (pengentasan kemiskinan).

Logo *Branding*:



Gambar 8. Logo Branding Proyek Perubahan (Abhipraya Samanvaya)

- Bentuk dasar: lingkaran, bermakna sebagai simbol satu kesatuan
- Isi: 6 elemen geometris (kelopak/segmen) mengarah ke tengah, bermakna 6 bidang pembangunan (sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur) berpadu menuju satu tujuan yang sama

- Titik pusat: lingkaran kecil (*core node*), bermakna koordinasi dan harmoni
- Warna biru melambangkan kepercayaan dan stabilitas kebijakan
- Warna hijau melambangkan pertumbuhan dan kesejahteraan
- Warna kuning/emas melambangkan harapan kesejahteraan
- *Tagline*: “Selaras Aksi-Tuntas Kemiskinan” menegaskan bahwa kemiskinan hanya dapat diselesaikan secara menyeluruh melalui gerakan bersama yang terintegrasi, selaras, dan berorientasi pada tindakan nyata.

5. Customer

Customer dari program ini adalah OPD Pemda DIY, OPD Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga dan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat.

3.4. Pemetaan *Stakeholders* dan Sumberdaya Organisasi

1. Identifikasi Kelompok dan Peran *Stakeholder*

Stakeholders merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara *parsial* yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap aksi perubahan yang dilakukan. *Stakeholders* yang terlibat dalam proyek perubahan terdiri dari *stakeholder* internal dan eksternal. *Stakeholders* internal merupakan pemangku kepentingan yang ada di dalam BAPPERIDA DIY, sedangkan *stakeholder* eksternal merupakan para pemangku kepentingan di luar BAPPERIDA DIY.

Tabel 9. *Stakeholder* berdasarkan Peran

No.	Stakeholder	Peran
1	Gubernur	Penanggung jawab utama kebijakan makro penanggulangan kemiskinan di wilayah DIY
2	Wakil Gubernur	Bertindak sebagai Ketua TKPK DIY yang berperan di <i>level</i> teknis operasional, memimpin rapat koordinasi lintas sektor, dan mengawal pelaksanaan teknis di lapangan
3	DPRD DIY dan DPRD Kab/Kota	Memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan sesuai perencanaan, penganggaran dan hasil reses
4	Bupati/Walikota	Penanggung jawab utama kebijakan makro penanggulangan kemiskinan di wilayah kab/kota masing-masing
5	Wakil Bupati/Wakil Walikota	Bertindak sebagai Ketua TKPK kab/kota yang berperan di <i>level</i> teknis operasional, memimpin rapat koordinasi lintas sektor, dan mengawal pelaksanaan teknis di lapangan
6	BPS DIY	Penyedia data statistik daerah
7	Kanwil DJPb DIY	Perwakilan Kementerian Keuangan di daerah yang berperan dalam mengatur dan memonitor pelaksanaan APBN di daerah
8	Dinas Sosial DIY dan Kab/Kota	<i>Leading</i> sektor data kemiskinan
9	Dinas Kominfo DIY dan Kab/Kota	Menyediakan layanan sistem data penanggulangan kemiskinan
10	Bapperida DIY dan Kab/Kota	Merumuskan strategi dan mengarahkan OPD dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
11	OPD DIY dan Kab/Kota	Melaksanakan program penanggulangan kemiskinan sesuai sektornya dan berkepentingan terhadap data sasaran sebagai basis data intervensi program
12	Forum TSLP (CSR) DIY	Mengkoordinasikan program-program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan
13	Akademisi	Memiliki program-program pengabdian masyarakat

14	Media	Memberikan informasi/pemberitaan program-program pemerintah
15	Masyarakat	Mengawal pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan supaya tepat sasaran

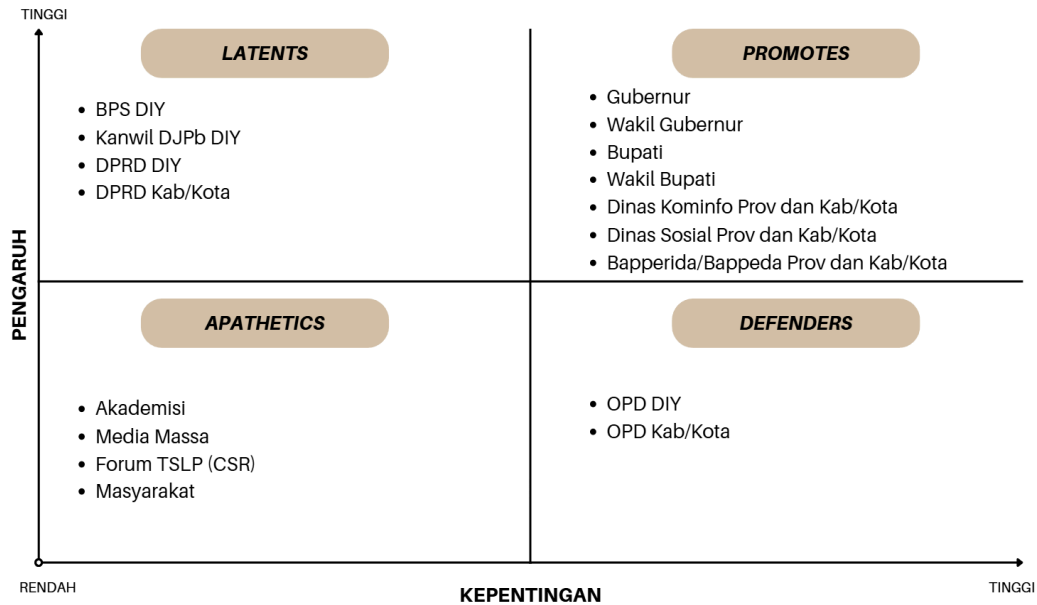
2. Identifikasi Jenis *Stakeholder*

Stakeholders dikelompokkan berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan yang dapat dibedakan menjadi empat kategori yaitu:

- 1) *Promoters*, yaitu *stakeholder* yang mempunyai pengaruh dan kepentingan besar terhadap aksi perubahan.
- 2) *Latents*, yaitu *stakeholder* yang mempunyai pengaruh besar tetapi kepentingan kecil terhadap aksi perubahan.
- 3) *Defenders*, yaitu *stakeholder* yang mempunyai pengaruh kecil tetapi kepentingan besar terhadap aksi perubahan.
- 4) *Apathetics*, yaitu *stakeholder* yang mempunyai pengaruh dan kepentingan kecil terhadap aksi perubahan.

3. Analisis dan Pengaruh Kepentingan

Pemetaan *stakeholder* merupakan tahapan strategis dalam pelaksanaan integrasi basis data kemiskinan guna memastikan terbangunnya dukungan, koordinasi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Identifikasi *stakeholders* dilakukan dengan mengidentifikasi institusi maupun individu yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap pelaksanaan integrasi basis data kemiskinan, dimana kepentingan dimaknai sebagai keterkaitan terhadap implementasi dan manfaat integrasi basis data kemiskinan, sedangkan pengaruh merupakan kemampuan pihak terkait dalam mendukung maupun mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan integrasi basis data kemiskinan.



Gambar 9. Pemetaan *stakeholder* berdasarkan Analisis dan Pengaruh Kepentingan

3.5. Mobilisasi *Stakeholder*/Strategi Komunikasi

Setelah teridentifikasi jenis maupun posisi kuadran berdasar tingkat pengaruh dan kepentingan dari *stakeholder*, untuk mengoptimalkan peran dan dukungan dari seluruh *stakeholder*, maka perlu dilakukan upaya komunikasi secara *customized* dan spesifik untuk masing-masing *stakeholder*. Berikut teknik komunikasi yang dilakukan kepada *stakeholder* berdasar letak kuadran tingkat pengaruh dan kepentingan.

Kelompok Stakeholder	Strategi Komunikasi
Promoters Memiliki pengaruh besar dan ketertarikan tinggi terhadap keberhasilan proyek	- Ajak dalam semua pengambilan keputusan strategis melalui rapat rutin. - Gunakan gaya komunikasi dua arah yang terbuka dan transparan. - Berikan laporan perkembangan secara berkala dan detail
Latents Memiliki kekuatan besar untuk memengaruhi atau menggagalkan proyek, tetapi ketertarikan mereka saat ini masih rendah	- Lakukan konsultasi formal untuk mendapatkan masukan atau persetujuan mereka. - Fokuskan pesan pada manfaat proyek yang relevan dengan agenda pribadi mereka. - Gunakan strategi edukasi dan persuasi untuk menggeser mereka menjadi <i>Promoters</i>.
Defenders Mendukung dan peduli dengan proyek Anda, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan finansial atau politik yang besar untuk membuat perubahan	- Berikan pembaruan informasi secara berkala melalui nawala (<i>newsletter</i>), situs web, atau media sosial. - Gunakan opini dan umpan balik mereka melalui survei atau kelompok diskusi terarah (FGD). - Libatkan mereka dalam kegiatan komunitas atau forum relawan. - Apresiasi dukungan mereka agar mereka tetap menjadi pembela setia proyek.
Apathetics Memiliki kepentingan khusus dan tidak mempunyai kekuatan untuk memengaruhi proyek secara signifikan	- Gunakan komunikasi satu arah yang bersifat informatif dan umum. - Pantau pergerakan atau perubahan sikap mereka sewaktu-waktu melalui pengamatan pasif. - Jangan menghabiskan terlalu banyak waktu atau anggaran komunikasi untuk kuadran ini. - Cukup pastikan mereka mengetahui keberadaan proyek tanpa perlu keterlibatan aktif.

Gambar 10. Mobilisasi *Stakeholder*/Strategi Komunikasi

3.6. Manajemen Risiko

Manajemen risiko dalam lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2017. Filosofi utama dari regulasi ini adalah integrasi manajemen risiko ke dalam seluruh proses bisnis dan kebijakan, dengan fokus pada pendekatan antisipatif daripada reaktif. Artinya, setiap langkah perencanaan harus mempertimbangkan potensi risiko sejak awal, sehingga mitigasi dapat dirancang sebelum masalah muncul.

Proses manajemen risiko diawali dengan identifikasi potensi masalah yang mungkin timbul dan dapat menghambat berjalannya proyek perubahan, dampak yang akan terjadi apabila potensi masalah tersebut tidak diselesaikan, dan alternatif solusi yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi potensi masalah tersebut sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 10. Identifikasi Potensi Masalah

No.	Potensi Masalah	Resiko yang Dihadapi	Alternatif Solusi
1	Keterbatasan SDM di Bapperida	Keterlambatan pencapaian output	Pembagian tugas secara jelas dengan target waktu
2	Beban kerja yang tinggi di Bapperida	Banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh pegawai Bapperida dapat menghambat pelaksanaan implementasi proyek perubahan	Membentuk tim lintas bidang dan memanfaatkan sarana kerja bersama (shared tools) yang terintegrasi
3	Ego sektoral	Output integrasi data tidak tercapai	Pemahaman tentang pentingnya data terpadu dan terintegrasi sebagai bagian pencapaian visi daerah
4	Ego kewilayahan	Output integrasi data tidak tercapai	Memperkuat komitmen pimpinan daerah sebagai jembatan untuk menyatukan berbagai kepentingan wilayah

IV. MATERI PELATIHAN PILIHAN

Rancangan Proyek Perubahan (RPP) dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II merupakan instrumen strategis untuk menerjemahkan kompetensi kepemimpinan strategis ke dalam praktik nyata organisasi pemerintahan. Rancangan Proyek Perubahan yang mengangkat isu Integrasi Basis Data Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, secara konseptual dan operasional memiliki keterkaitan yang erat dengan materi pelatihan antara lain diagnosis organisasi, manajemen pemerintahan, dan pengawasan berbasis risiko, karena terkait dengan penyediaan data yang terintegrasi untuk mendukung kolaborasi intervensi program-program penanggulangan kemiskinan.

4.1. Diagnosa Organisasi

Modul Diagnosa Organisasi Lembaga Administrasi Negara memandang organisasi publik sebagai sistem terbuka sehingga diperlukan diagnosa untuk mengidentifikasi kesenjangan dan akar masalah ketika terjadi ketidaksinkronan. Pendekatan ini diterapkan pada pengentasan kemiskinan di DIY yang masih menghadapi kendala lemahnya integrasi perencanaan, koordinasi lintas sektor, dan perbedaan basis data kemiskinan. Integrasi basis data kemiskinan dirancang sebagai intervensi strategis untuk memperkuat integrasi, koordinasi, dan penyelarasan program pengentasan kemiskinan menuju penurunan angka kemiskinan DIY secara berkelanjutan.

Dengan materi ini diharapkan dapat membantu penyelesaian proyek perubahan ini, untuk:

1. Meningkatkan kemampuan sistematis untuk memetakan kapasitas, kelemahan dan potensi lembaga.
2. Membantu menganalisis data terpadu.
3. Mengidentifikasi hambatan birokrasi dan ego sektoral antar instansi guna membangun aliran komunikasi data yang transparan dan kolaboratif.

4.2. Manajemen Pemerintahan

Manajemen pemerintahan adalah proses pengelolaan pemerintahan melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang terintegrasi, berlandaskan UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014 yang menekankan sinkronisasi pusat–daerah, koordinasi lintas sektor, dan akuntabilitas. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, pendekatan ini digunakan untuk mengintegrasikan program-program intervensi pengentasan kemiskinan ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah melalui penguatan koordinasi dan penyelarasan kebijakan guna mewujudkan data dan

intervensi program yang terintegrasi. Melalui pendekatan manajemen pemerintahan yang utuh, mulai dari perencanaan berbasis isu strategis, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, hingga integrasi dalam dokumen perencanaan, aksi perubahan ini menjadi contoh nyata bagaimana teori manajemen pemerintahan diterapkan secara konkret dalam praktik pembangunan daerah.

Melalui materi pelatihan ini diharapkan dapat mendukung penyelesaian proyek perubahan untuk:

1. Menyelaraskan visi integrasi data kemiskinan dengan target perencanaan dan strategi nasional.
2. Meningkatkan kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah, mengingat ego sektoral dan ego kewilayahan sering menjadi penghambat utama dalam integrasi data.
3. Mengantisipasi resistensi dari aparatur saat berpindah dari sistem kerja manual/silokultural ke sistem digital yang lebih terintegrasi.

4.3. Pengawasan Berbasis Risiko

Pengawasan Berbasis Risiko adalah suatu metode atau pendekatan pengawasan yang berfokus pada potensi risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi, institusi, atau program, serta bagaimana organisasi tersebut mengelola risiko tersebut. Dalam konteks proyek perubahan integrasi basis data kemiskinan, pengawasan berbasis risiko sangat penting untuk mengantisipasi kegagalan sistem, kebocoran data, atau resistensi aparatur sejak dini, sehingga proses transisi tetap berjalan aman dan mencapai tujuannya.

Melalui materi pelatihan ini diharapkan dapat mendukung penyelesaian proyek perubahan untuk:

1. Memitigasi kesalahan data kemiskinan yang akan diintegrasikan.
2. Membantu monitoring kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah untuk memastikan program berjalan sesuai rencana.
3. Menyusun rekomendasi perbaikan kebijakan dan evaluasi berkelanjutan.

V. PEMETAAN SIKAP PERILAKU

Untuk menggambarkan aspek sikap dan perilaku kepemimpinan peserta pelatihan kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II maka perlu dilakukan pemetaan (*assessment*). Persepsi penilaian memadukan penilaian dari peserta (*self assessment*) dengan penilaian dari atasan langsung (*mentor*). Di bawah ini adalah hasil penilaian awal yang dilakukan oleh mentor dan peserta pelatihan.

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta	: Danang Setiadi, S.I.P., M.T.	Nama Mentor	: Ni Made Dwipanti Indrayanti, S.T., M.T.
NIP	: 197704062005011007	NIP:	: 197010181998032007
Jabatan	: Kepala BAPPERIDA DIY	Jabatan	: Sekretaris Daerah DIY
Instansi	: BAPPERIDA DIY	Instansi	: Sekretaris Daerah DIY
Program	: PKN Tingkat II Angkatan VIII Tahun 2026		

	Nilai Komponen				Kualifikasi Total Sub Komponen
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	
Peserta	8.17	8.40	8.30	8.29	Baik
Mentor	8.67	8.70	8.60	8.66	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	8.52	8.61	8.51	8.55	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	

Keterangan Kualifikasi

9.00-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku
8.55
Kualifikasi: Baik

Gambar 11. Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta

Dari proses identifikasi pengembangan potensi diri, didapatkan gambaran penilaian sebagai berikut:

1. Isian Formulir Hasil Identifikasi Pengenalan Diri dari Peserta dengan aspek penilaian yang terdiri dari aspek integritas (*managing self*), aspek kerjasama (*managing others*) dan aspek mengelola perubahan (*managing organization*). Dari ketiga aspek tersebut didapatkan hasil nilai rata-rata sikap perilaku sebesar 8,29 atau termasuk dalam kategori baik.
2. Isian Formulir Hasil Identifikasi Pengenalan Diri dari Mentor Hasil identifikasi pengenalan diri yang dilaksanakan oleh mentor dengan aspek dan isian formulir yang sama mendapatkan hasil rata-rata sikap perilaku 8,66 atau termasuk dalam kategori baik.
3. Hasil Isian Identifikasi Peserta dengan Mentor setelah dilakukan penghitungan bersama memperoleh hasil rata-rata sikap perilaku 8,55 sehingga termasuk dalam kategori baik.

Menurut hasil penilaian tersebut, apabila penilaian peserta masuk dalam kategori baik, maka peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan tinggi pratama.

Pengembangan potensi diri adalah proses yang melibatkan upaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas individu untuk mencapai potensi maksimal. Potensi diri meliputi berbagai aspek, seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh individu. Potensi diri dapat dikembangkan melalui berbagai upaya, seperti pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, serta pengembangan diri secara mandiri. Selanjutnya, sesuai dengan rekomendasi bahwa peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal, rencana pengembangan potensi diri dalam proses proyek perubahan kepemimpinan strategis ini adalah :

Tabel 11. Rencana Pengembangan Potensi Diri dalam Proses Proyek Perubahan

No	Sub Komponen	Kompetensi yang akan dikembangkan	Indikator keberhasilan	Strategi pengembangan
1	Integritas	- Disiplin mematuhi ketentuan - Bertindak sesuai aturan - Konsistensi	Pelaksanaan kegiatan konsisten dan disusun sesuai dengan regulasi	• Mempelajari etika atau integritas melalui buku bacaan atau media lainnya • Aktif dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan di lingkungan BAPPERIDA serta Pemda DIY • Memimpin tim dalam pelaksanaan rencana aksi
2	Kerjasama	- Kontribusi aktif sesuai peran - Aktif mencari peluang kolaborasi	Koordinasi, kolaborasi dan komunikasi berjalan lancar dan efektif	• Mempelajari teknik membangun kerjasama melalui buku bacaan atau media lainnya

		- Komunikasi dan kolaborasi		• Membangun komitmen kerjasama dan komunikasi efektif • Rapat koordinasi rutin
3	Mengelola perubahan	- Aktif mencari peluang agar pelaksanaan tugas semakin baik - Sigap menghadapi perubahan - Memberi kepercayaan pada bawahan	Mampu memimpin perubahan	• Mempelajari teknik membangun kerjasama melalui buku bacaan atau media lainnya • Koordinasi pengelolaan aksi perubahan • Mengikuti pendampingan oleh mentor dan <i>coach</i>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DANANG SETIADI, S.I.P., M.T.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah DIY

Yogyakarta, Indonesia

[✉ danang.setiadi@jogjaprovo.go.id](mailto:danang.setiadi@jogjaprovo.go.id)

 0812-2730-165



PROFIL PROFESIONAL

Pejabat pemerintah daerah dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dalam bidang perencanaan pembangunan, tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pengendalian kebijakan strategis di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Memiliki rekam jejak kepemimpinan lintas sektor, penguatan tata kelola pemerintahan, serta koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan daerah berbasis kolaborasi dan inovasi.

Berpengalaman memimpin transformasi perencanaan pembangunan daerah, penguatan tata kelola keistimewaan DIY, serta integrasi program lintas OPD dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

KEUNGGULAN UTAMA

Strategic Government Planning

Public Policy & Regional Development

Leadership & Bureaucratic Transformation
Cross-sector Collaboration
Regional Innovation & Governance
Digital Leadership
Community Empowerment
Performance Management

HIGHLIGHT KINERJA & PERFORMA

Kepemimpinan Strategis

Memimpin Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah DIY dalam penguatan sinkronisasi pembangunan daerah dan inovasi kebijakan strategis. Mengawal penyusunan RPJMD DIY 2022–2027 serta perumusan visi-misi pembangunan daerah. Berperan dalam pengendalian pembangunan daerah dan penguatan kolaborasi lintas sektor di DIY.

Transformasi Tata Kelola

Memimpin Biro Tata Pemerintahan DIY dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Mengembangkan pendekatan kolaboratif dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan wilayah.

Pengembangan SDM & Inovasi

Aktif dalam pengembangan kepemimpinan digital sektor publik melalui program Smart Digital Leader Province.

Mendorong budaya kerja berbasis integritas, inovasi, dan kinerja.

Rekam Jejak Kinerja

Predikat Kinerja “BAIK” secara konsisten pada tahun 2022–2025.

Tidak memiliki catatan hukuman disiplin.

Penerima Penghargaan Karya Satya 10 Tahun.

PENGALAMAN JABATAN

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah DIY 2025 – Sekarang

Kepala Biro Tata Pemerintahan DIY 2025

Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat DIY 2024 – 2025

Kepala Bidang Perencanaan 2020 – 2024

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan 2019 – 2020

Kepala Subbidang Perencanaan Kewilayahan 2017 – 2019

Kepala Sub Bidang Perencanaan Sektoral 2015 – 2017

Kepala Sub Bidang Pengembangan SDM 2014 – 2015

PENDIDIKAN

Pasca Sarjana (S2): Magister Studi Pembangunan, Institut Teknologi Bandung

Sarjana (S1): Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

Sekolah Menengah Atas (SMA): SMA Negeri 3 Yogyakarta

Sekolah Menengah Pertama (SMP): SMP Negeri 9 Yogyakarta

Sekolah Dasar (SD): SD Negeri Kotagede 3 Yogyakarta

PELATIHAN & SERTIFIKASI UNGGULAN

Smart Digital Leader Province – Kementerian Komunikasi dan Digital

Pelatihan Penguatan Integritas & Antikorupsi – KPK RI

Diklat PIM Tingkat III / PKA

Diklat PIM Tingkat IV / PKP

Training of Trainer Pengelolaan Keuangan Desa

English for BAPPEDA Staffs
